

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Keagenan/*Agency Theory* dan Teori Asimetri Informasi

Teori Keagenan menurut Supriyono (2002) adalah:

“suatu hubungan yang muncul antara satu pihak, disebut *principal* yang menyewa pihak lain, disebut agen untuk melakukan sejumlah jasa, dan oleh sebab itu, *principal* juga memberikan wewenang pembuatan keputusan pada agen”

Teori keagenan menjelaskan bahwa apabila terjadi pemisahan antara pemilik perusahaan sebagai *principal* dan manajemen perusahaan sebagai agen yang mengelola perusahaan, maka akan memunculkan suatu masalah agensi karena kedua belah pihak baik pihak *principal* dan manajemen akan selalu berusaha untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya masing-masing (Jensen dan Meckling, 1976). Biaya keagenan (*agency cost*) adalah:

“suatu biaya yang muncul akibat adanya konflik kepentingan yang terjadi antara manajer selaku agen dan pemegang saham (pemilik).”

Konflik keagenan terjadi apabila pemilik perusahaan bukan menjadi bagian dari manajemen suatu perusahaan. Manajer yang tidak memiliki kepentingan terhadap dividen perusahaan kemungkinan besar akan bertindak *opportunistic*, yaitu menggunakan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi seperti menggunakan

fasilitas berlebih perusahaan atau melakukan investasi yang kurang menguntungkan untuk perusahaan (*overinvestment*) (Ross dkk, 2008).

Adanya keagenan ini dapat menimbulkan masalah yang disebabkan karena perbedaan informasi yang didapatkan oleh pemilik dan manajemen. Manajer sering kali punya lebih banyak informasi tentang kondisi dan kinerja perusahaan daripada *principal*. Hal inilah yang kemudian disebut sebagai asimetri informasi. Menurut Scott (1977), asimetri informasi terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. *Adverse selection*, yaitu manajer dan orang-orang yang terlibat di dalamnya atau dapat disebut para pihak internal perusahaan mengetahui lebih banyak informasi dibandingkan dengan para pemegang saham yang menjadi pihak eksternal perusahaan.
2. *Moral hazard*, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan tidak sepenuhnya dapat diketahui oleh para pemegang saham, investor ataupun kreditur sehingga pihak internal perusahaan dapat melakukan tindakan-tindakan diluar sepengetahuan para pemegang saham, investor maupun kreditur.

Keinginan agen yang berbeda dengan *principal* akan memunculkan masalah keagenan. Menurut Haruman (2008), kepemilikan managerial, kepemilikan institusional dan komite audit dapat mengurangi masalah keagenan. Hal ini mungkin terjadi karena dengan adanya hal-hal tersebut, maka pengawasan kepada pihak manajemen perusahaan akan meningkat sehingga perilaku *opportunistic* agen dapat diminimalkan.

2.2. Kebijakan Dividen

Menurut Sartono (2011), pengertian kebijakan dividen adalah:

“ketetapan terkait laba yang diperoleh perusahaan yang akan dibagikan kepada pemegang saham (pemilik perusahaan) sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan untuk pembiayaan investasi di masa yang akan datang.”

Kebijakan dividen menjadi hal yang penting dalam sebuah perusahaan karena memiliki hubungan dengan teori agensi. Menurut Sutrisno (2001) mengartikan kebijakan dividen sebagai:

“suatu ketetapan yang terkait dengan pembayaran dividen oleh perusahaan, berupa penetapan besarnya dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dan besarnya saldo laba ditahan untuk kepentingan perusahaan.”

Terdapat faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan dividen suatu perusahaan antara lain tersedianya kesempatan investasi, ketersediaan biaya modal alternatif, serta preferensi pemegang saham untuk menerima keuntungan saat ini atau di masa yang akan datang. Akan tetapi, menurut Sartono (2011) ada beberapa faktor yang perlu juga untuk dianalisis dan cukup penting dalam kaitannya dengan kebijakan dividen, yaitu:

1. Kebutuhan Dana Perusahaan

Kebutuhan dana perusahaan yang dimaksud antara lain aliran kas perusahaan yang diharapkan, pengeluaran modal di masa akan datang yang diharapkan oleh perusahaan, kebutuhan tambahan persediaan dan piutang, serta pengurangan utang perusahaan.

2. Likuiditas

Hal ini berkaitan dengan kas keluar. Jika posisi kas dan likuiditas perusahaan semakin besar secara keseluruhan, maka kemampuan perusahaan untuk membayar dividen akan semakin besar juga.

3. Kemampuan Meminjam

Kemampuan meminjam yang dimaksud adalah kemampuan perusahaan untuk meminjam dalam jangka pendek. Kemampuan tersebut digunakan untuk mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan posisi likuiditas perusahaan sehingga likuiditas perusahaan bersifat fleksibel sesuai dengan kemampuan meminjam jangka pendek yang dimiliki perusahaan tersebut.

4. Keadaan Pemegang Saham

Keadaan pemegang saham dapat mempengaruhi dividen. Hal ini dapat dilihat dari jenis kepemilikan saham yang ada dalam perusahaan tersebut, misalnya kepemilikan saham dalam perusahaan tersebut relatif tertutup, maka pada umumnya manajemen bisa mengetahui tindakan apa yang perlu diambil dan juga mengetahui dividen yang diharapkan oleh para pemegang saham.

5. Stabilitas Dividen

Stabilitas perusahaan dalam membagikan dividen. Stabilitas ini dapat dilihat dengan tingkat pertumbuhan perusahaan yang akan menunjukkan hasil dari kinerja perusahaan. Selain itu, stabilitas juga dapat dilihat dari harga saham yang semakin meningkat.

6. Pengukuran Dividen

Kebijakan dividen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan pendanaan perusahaan. Dalam pengukuran dividen digunakan rasio untuk pembayaran dividen yakni *dividend payout ratio* yang digunakan untuk menentukan besarnya laba yang bisa ditahan sebagai sumber pendanaan perusahaan. Semakin besar laba yang ditahan maka semakin sedikit jumlah laba yang dapat dialokasikan untuk membayarkan dividen. Pengertian rasio pembayaran dividen adalah persentase laba yang dibayarkan dalam bentuk dividen dan ditentukan dengan total laba yang tersedia bagi pemegang saham (Horne dan Wachowicz, 2009).

Rasio dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$DPR = \frac{\text{Dividen per Lembar Saham}}{\text{Laba per Lembar Saham}}$$

a) Dividen Per Lembar Saham (*Dividend Per Share*)

Menurut Horne dan Wachowicz (2009) dividen per lembar saham (DPS) adalah:

“besarnya dividen perusahaan yang akan dibagikan kepada para pemegang saham setelah dibagi dengan rata – rata tertimbang saham biasa yang beredar.”

Untuk mencari besarnya dividen per lembar saham dapat menggunakan rumus:

$$DPS = \frac{\text{Total Dividen yang Dibagikan}}{\text{Jumlah Lembar Saham yang Beredar}}$$

b) Laba Per Lembar Saham (*Earning Per Share*)

Menurut Brigham dan Houston (2011), pengertian laba per lembar saham adalah:

“banyaknya pendapatan yang didapatkan dalam suatu periode tertentu untuk setiap jumlah saham yang beredar.”

Laba per lembar saham (EPS) dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

$$EPS = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Jumlah Lembar Saham yang Beredar}}$$

2.3. Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris pada perusahaan ditekankan fungsi *monitoring* dari implementasi kebijakan direksi sehingga kinerja yang dihasilkan oleh manajemen sesuai dengan keinginan pemegang saham. Semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris maka perusahaan akan mengalami kesulitan dalam menjalankan perannya, antara lain yaitu kesulitan dalam berkomunikasi serta mengkoordinasikan kinerja dari masing-masing anggota dewan itu sendiri, kesulitan untuk mengawasi dan mengendalikan tindakan manajemen, dan juga kesulitan dalam mengambil keputusan

yang berguna bagi perusahaan (Jensen, 1993). Dewan komisaris merupakan mekanisme *governance* yang penting (Allen dan Gale, 2000). Ukuran dewan komisaris menunjukkan seberapa banyak dewan komisaris yang ada di dalam perusahaan dan diukur dengan log natural dari total jumlah dewan komisaris (Rajput dan Jhunnhunwala, 2019).

2.4. Independensi Dewan Komisaris

Komisaris independen adalah dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan (Effendi, 2016). Komisaris independen tidak mempunyai keterkaitan dengan pemegang saham utama, anggota direksi, maupun anggota dewan komisaris lainnya, dan tidak memiliki hubungan usaha terkait dengan kegiatan usaha perusahaan. Komisaris independen juga tidak mempunyai saham di perusahaan terkait. Peranan dari komisaris independen dalam perusahaan adalah untuk memastikan praktik dan prinsip-prinsip *good corporate governance* dipatuhi serta dijalankan dengan baik. Menurut Nasrum dan Uleng (2018), dewan komisaris independen mempunyai kekuatan lebih besar dibandingkan dengan dewan komisaris dimana konteks independensi ini menjadi semakin rumit pada perusahaan yang sedang berada dalam situasi kesulitan keuangan. Bila dewan komisaris independen menerapkan strategi yang agresif untuk mengatasi kinerja perusahaan yang terus menurun, maka dari itu adanya direksi dari luar akan memacu pengambilan keputusan untuk melakukan suatu perubahan (Nasrum dan Uleng, 2018).

2.5. Kepemilikan Investor Institusi Dalam Negeri

Kepemilikan institusi dalam negeri adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain dalam negeri yang meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajemen secara lebih optimal (Udin dkk, 2017). Keberadaan investor institusi dianggap bisa menjadi bentuk pengawasan atau *monitoring* yang efektif untuk keputusan-keputusan yang akan diambil oleh manajer. Hal tersebut disebabkan karena pihak institusi ikut serta secara langsung didalam pengambilan keputusan perusahaan sehingga akan sulit untuk percaya terhadap tindakan manipulasi dan akan mendorong pengawasan yang lebih optimal.

2.6. Kepemilikan Investor Institusi Asing

Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh pihak luar negeri atau asing baik secara individu maupun institusi dengan indikator persentase jumlah lembar saham yang dimiliki oleh pihak asing (Udin dkk, 2017). Investor asing memberikan insentif lebih demi tercapainya sebuah kinerja perusahaan yang lebih tinggi, karena investor asing begitu ketat dalam mengawasi manajemen suatu perusahaan. Manajer juga harus memberikan informasi yang jelas dan dapat dipahami oleh investor asing. Hal ini bertujuan untuk mengatasi dan mengurangi asimetri informasi demi keberlangsungan hidup suatu perusahaan.

2.7. Lokasi Kantor Pusat Perusahaan

2.7.1. Lokasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), lokasi diartikan sebagai letak maupun tempat. Sedangkan menurut Heizer dan Render (2015), lokasi adalah pendorong suatu biaya dan pendapatan, maka lokasi dianggap mempunyai kekuasaan untuk membentuk strategi bisnis suatu perusahaan. Penentuan lokasi yang strategis memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan dari lokasi baru perusahaan.

2.7.2. Kantor Pusat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian kantor pusat adalah:

“kantor besar yang menjadi induk kantor cabang”.

Dari pengertian diatas, maka yang dimaksud lokasi kantor pusat perusahaan adalah suatu tempat dimana kantor besar yang menjadi induk kantor cabang didirikan.

2.8. Kajian Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan hasil yang bervariasi. Elmaghri dkk (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kebijakan dividen pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang terdaftar di Inggris dengan hasil bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap kebijakan dividen, sedangkan independensi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Hasil penelitian berbeda ditunjukkan pada penelitian yang

dilakukan oleh Rajput dan Jhunnjhunwala (2019) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris dan independensi dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Penelitian yang dilakukan oleh Rajput dan Jhunnjhunwala (2019) juga memiliki hasil lain yaitu kepemilikan investor institusi dalam negeri memiliki pengaruh negatif terhadap kebijakan dividen dan kepemilikan investor institusi asing yang tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen.

Penelitian yang dilakukan oleh Farooq dan Aktaruzzaman (2019) meneliti hubungan antara lokasi kantor pusat di pusat keuangan suatu negara terhadap kebijakan dividen pada perusahaan-perusahaan yang berkantor pusat di pusat keuangan dan perusahaan yang berkantor pusat di kota lain di India. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perusahaan yang berkantor pusat di Mumbai, pusat keuangan utama India, memiliki rasio pembayaran yang lebih tinggi daripada perusahaan yang berkantor pusat di kota lain.

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Dividen

Dewan komisaris diperlukan didalam suatu perusahaan untuk memantau dan mengendalikan atau dengan kata lain melakukan *monitoring* terhadap perilaku manajemen perusahaan. Didalam teori keagenan terdapat perilaku *opportunistic* dimana manajemen perusahaan apabila tidak diawasi oleh dewan komisaris bisa saja akan melakukan hal tersebut yang akan mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan. Ukuran dewan komisaris yang lebih besar cenderung dikaitkan dengan pemantauan manajerial yang lebih besar dan dengan demikian maka perilaku

opportunistic tersebut dapat dihindari. Perilaku *opportunistic* yang dilakukan oleh manajerial salah satunya yaitu pada saat perusahaan sedang dalam kinerja yang baik manajemen akan menurunkan laba untuk menunda kinerja yang baik atau dengan kata lain manajemen akan membuat kinerja pada periode berikutnya ($t+1$) terlihat lebih baik daripada periode saat ini (t). Penurunan laba inilah yang membuat dividen yang diberikan kepada pemegang saham menjadi menurun karena pada dasarnya pembagian dividen didasarkan pada laba yang diperoleh oleh perusahaan. Maka dari itu apabila perilaku *opportunistic* manajerial tidak diawasi maka akan mengurangi jumlah dividen yang dibagikan.

Penelitian terdahulu yang menggunakan variabel ukuran dewan komisaris sebagai variabel independen dan kebijakan dividen sebagai variabel dependen sudah dilakukan beberapa peneliti. Penelitian oleh Elmagrhi dkk (2017) menunjukkan hasil bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kebijakan dividen. Hal serupa juga ditunjukkan dengan hasil penelitian oleh Rajput dan Jhunjhunwala (2019). Berdasarkan teori keagenan dan hasil dari penelitian terdahulu, dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

Ha₁ : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Kebijakan Dividen

2.9.2. Pengaruh Independensi Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Dividen

Independensi dewan komisaris dapat dilihat berdasarkan dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan (Effendi, 2016). Dewan komisaris independen ini memiliki posisi yang kuat untuk memantau dan mengontrol perilaku *opportunistic*

manajer untuk meningkatkan kinerja perusahaan sehingga dapat terlihat oleh para pemegang saham sebagai *principal*. Menurut Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hal tersebut dikarenakan dewan komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan sedangkan dewan komisaris bukan independen diangkat berdasarkan rapat Dewan Komisaris. Oleh sebab itu manajemen akan lebih memprioritaskan kepentingan pemegang saham dibandingkan dengan perilaku *opportunistic*-nya. Disaat manajemen memprioritaskan kepentingan pemegang saham daripada kepentingan pribadi manajemen yang dikarenakan meningkatnya pengawasan dewan komisaris independen akan menyebabkan pelaporan kinerja keuangan yang dilakukan oleh perusahaan dilaporkan sesuai dengan keadaan sebenarnya tidak ada yang dikurangi sehingga penggunaan laba perusahaan untuk kepentingan manajemen dapat dihindari dan menyebabkan dividen dibagikan kepada pemegang saham meningkat.

Penelitian terdahulu yang menggunakan variabel independensi dewan komisaris sebagai variabel independen dan kebijakan dividen sebagai variabel dependen sudah dilakukan beberapa peneliti. Penelitian oleh Elmagrhi dkk (2017) menunjukkan hasil bahwa independensi dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen. Namun, hasil berbeda ditunjukkan dengan hasil penelitian oleh Rajput dan Jhunjhunwala (2019) yaitu independensi dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kebijakan dividen. Berdasarkan teori keagenan dan hasil dari penelitian terdahulu, dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

Ha₂ : Independensi Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Kebijakan Dividen

2.9.3. Pengaruh Kepemilikan Investor Institusi Dalam Negeri terhadap Kebijakan Dividen

Perusahaan yang sudah memutuskan untuk menawarkan sahamnya ke publik akan mempengaruhi struktur kepemilikan perusahaan yang dapat dilihat dari pemegang sahamnya. Salah satu bentuk kepemilikan yaitu kepemilikan oleh investor institusi dalam negeri atau dengan kata lain kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain dalam negeri yang meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajemen secara lebih optimal (Udin dkk, 2017). Hal tersebut dikarenakan investor institusi dalam negeri memiliki kepentingan dalam perusahaan salah satunya memperoleh imbal hasil yang kepemilikannya ditunjukkan dengan porsi kepemilikan saham perusahaan dan menyebabkan kinerja manajemen menjadi faktor penting dalam keputusan investor untuk tetap berinvestasi atau tidak sehingga akan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajemen.

Dalam teori keagenan, investor dalam negeri ini disebut sebagai *principal* dan manajemen sebagai agen. Investor dalam negeri akan menginginkan perusahaan untuk membagikan dividen yang besar sedangkan dari manajemen menginginkan hal sebaliknya. Hal tersebut yang menjadi penyebab munculnya permasalahan agensi karena masing-masing pihak akan selalu berusaha untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya (Jensen dan Meckling, 1976). Sehingga investor dalam negeri (*principal*)

akan mengawasi keputusan yang akan diambil oleh manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusi dalam negeri ini akan membuat manajemen memiliki pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan menghindari melakukan tindakan-tindakan yang merugikan perusahaan. Pengawasan tersebut akan meningkatkan kinerja perusahaan serta meningkatkan dividen yang dibagikan kepada pemegang saham akibat meningkatnya laba perusahaan.

Penelitian terdahulu yang menggunakan variabel kepemilikan investor institusi dalam negeri sebagai variabel independen dan kebijakan dividen sebagai variabel dependen sudah dilakukan oleh Rajput dan Jhunjhunwala (2019) yaitu kepemilikan investor institusi dalam negeri memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap kebijakan dividen. Namun berdasarkan teori dalam penelitian ini dan uraian peneliti, dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

Ha₃ : Kepemilikan Investor Institusi Dalam Negeri berpengaruh positif terhadap Kebijakan Dividen

2.9.4. Pengaruh Kepemilikan Investor Institusi Asing terhadap Kebijakan Dividen

Sama halnya dengan kepemilikan investor institusi dalam negeri, yang membedakannya adalah pada kepemilikan perusahaan ditunjukkan dengan indikator presentasi jumlah lembar saham yang dimiliki oleh pihak asing (Udin dkk, 2017). Investor institusi asing akan menginginkan perusahaan membagikan dividen yang besar karena selain menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik namun memberikan keuntungan bagi investor tersebut dalam bentuk dividen.

Investor asing ini juga akan mengawasi keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan untuk menghindari perilaku *opportunistic* agen (manajemen perusahaan). Pengawasan tersebut akan membuat manajemen kesulitan untuk melakukan tindakan-tindakan pribadi yang menggunakan aset perusahaan untuk diinvestasikan pada investasi yang *low risk* dan *low return*. Sehingga dimungkinkan manajemen akan menurunkan laba yang dilaporkan karena digunakan untuk hal lain tanpa sepengetahuan maupun persetujuan dari pemegang saham. Maka dari itu, apabila perilaku *opportunistic* manajemen tidak dapat dilakukan maka akan meningkatkan laba dan menyebabkan dividen yang dibagikan perusahaan kepada pemegang saham meningkat.

Penelitian terdahulu yang menggunakan variabel kepemilikan investor institusi asing sebagai variabel independen dan kebijakan dividen sebagai variabel dependen sudah dilakukan oleh Rajput dan Jhunjhunwala (2019) yaitu kepemilikan investor institusi asing tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Namun berdasarkan teori dalam penelitian ini dan uraian peneliti, dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

Ha4 : Kepemilikan Investor Institusi Asing berpengaruh positif terhadap Kebijakan Dividen

2.9.5. Pengaruh Lokasi Kantor Pusat Perusahaan terhadap Kebijakan Dividen

Lokasi kantor pusat perusahaan-perusahaan yang didirikan di Indonesia memiliki lokasi kantor pusatnya yang berbeda-beda. Menurut (Farooq dan El

Ouadrhiri, 2014), lokasi kantor pusat perusahaan-perusahaan di negara berkembang biasanya diatur sedemikian rupa pada satu lokasi geografi tertentu. Lokasi yang dimaksud yaitu wilayah pusat keuangan suatu negara, karena menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan bisnis serta persaingan yang ketat sehingga perusahaan yang didirikan di wilayah ini akan memiliki standar dalam menyampaikan informasi keuangan perusahaan kepada masyarakat terkait perusahaannya akibat persaingan yang terjadi antar perusahaan di wilayah pusat keuangan suatu negara tersebut (Farooq dan El Ouadrhiri, 2014). Adanya standar penyampaian informasi keuangan perusahaan oleh persaingan perusahaan yang berkantor pusat di wilayah pusat keuangan suatu negara tersebut menyebabkan asimetri informasi diantara manajemen dan pemegang saham pada suatu perusahaan menjadi lebih rendah sehingga banyaknya informasi keuangan perusahaan yang dimiliki oleh manajemen suatu perusahaan dan pemegang saham suatu perusahaan sama banyaknya atau tidak ada informasi keuangan yang dirahasiakan maupun ditutup-tutupi.

Asimetri informasi yang lebih rendah membuat manajemen perusahaan memiliki tanggung jawab atas kebijakan yang dibuat perusahaan terhadap para pemegang sahamnya dan juga pemegang saham dapat meminta pertanggungjawaban apabila kebijakan yang dibuat oleh perusahaan tidak sesuai dengan informasi keuangan yang dimiliki oleh pemegang saham, salah satu kebijakan yang dimaksud yaitu kebijakan dividen perusahaan. Penelitian oleh Farooq dan Aktaruzzaman (2019) menunjukkan hasil bahwa perusahaan yang berkantor pusat di wilayah pusat keuangan suatu negara memiliki rasio pembayaran dividen yang lebih tinggi daripada

perusahaan yang berkantor pusat di wilayah lain. Berdasarkan uraian oleh peneliti dan hasil dari penelitian terdahulu, dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

Has : Lokasi Kantor Pusat Perusahaan berpengaruh positif terhadap Kebijakan Dividen

